1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, dinamika Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Sumbawa pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan tren fluktuatif yang diawali dengan deflasi pada bulan Juli, kemudian berbalik mengalami inflasi pada bulan Agustus dan meningkat pada bulan September 2026.

Bulan	**IHK**	**Inflasi m-to-m (%)**	**Inflasi y-to-d (%)**	**Inflasi y-on-y (%)**
Juli 2026	111,86	**-0,37%**	1,71%	2,50%
Agustus 2026	112,45	**0,53%**	2,25%	3,97%
September 2026	113,23	**0,69%**	2,96%	4,57%

- **Dinamika Inflasi Bulan Juli 2026**

Pada bulan Juli 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Sumbawa berada pada angka 111,86, mencatatkan deflasi bulanan (m-to-m) sebesar -0,37%. Adapun tingkat inflasi tahun kalender (y-to-d) tercatat 1,71% dan inflasi tahunan (y-on-y) sebesar 2,50%. Deflasi bulanan ini terutama disumbang oleh penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi m-to-m sebesar -1,32% dengan andil deflasi mencapai -0,58%.

- Komoditas Penekan Inflasi (Deflasi m-to-m): Cabai Rawit (-0,23%), Bawang Merah (-0,11%), Tomat (-0,11%), Cabai Merah (-0,10%), Emas Perhiasan (-0,12%), Daging Ayam Ras (-0,07%), Kol Putih/Kubis (-0,06%), Cumi-Cumi (-0,06%), Terong (-0,04%), Sawi Hijau (-0,04%), Ikan Tongkol (-0,03%), Wortel (-0,03%), dan Bayam (-0,03%).
- Komoditas Pendorong Inflasi (m-to-m): Ikan Layang (+0,14%), Pelumas/Oli Mesin (+0,11%), Ikan Teri (+0,10%), Batu Bata/Batu Tela (+0,10%), Daging Sapi (+0,03%), Sigaret Kretek Tangan (+0,03%), Sigaret Putih Mesin (+0,03%), dan Bawang Putih (+0,02%).
    - **Dinamika Inflasi Bulan Agustus 2026**

Pada bulan Agustus 2026, Kabupaten Sumbawa mengalami pembalikan arah harga menuju inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 0,53%, dengan IHK meningkat menjadi 112,45. Inflation y-to-d naik menjadi 2,25% dan inflasi y-on-y melonjak mencapai 3,97%. Pendorong utama inflasi bulan Agustus berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

- Komoditas Pendorong Inflasi (m-to-m): Ikan Layang (+0,18%), Daging Ayam Ras (+0,10%), Cabai Rawit (+0,10%), Ikan Tongkol (+0,06%), Bahan Bakar Rumah Tangga / LPG (+0,04%), Beras (+0,04%), Mobil (+0,03%), Kacang Panjang (+0,03%), Ikan Teri (+0,02%), Terong (+0,02%), Kangkung (+0,02%), dan Semen (+0,01%).
- Komoditas Penekan Inflasi (Deflasi m-to-m): Tomat (-0,09%), Udang Basah (-0,07%), Asam (-0,03%), Bawang Merah (-0,03%), Cumi-Cumi (-0,03%), Kol Putih (-0,03%), Sawi Hijau (-0,02%), Cabai Merah (-0,02%), Bawang Putih (-0,01%), dan Minyak Goreng (-0,01%).
    - **Dinamika Inflasi Bulan September 2026**

Tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa berlanjut pada bulan September 2026 dengan inflasi

bulanan (m-to-m) mencapai 0,69% dan IHK naik menjadi 113,23. Laju inflasi tahun kalender (y-to-d) menyentuh 2,96% dan inflasi tahunan (y-on-y) tercatat 4,57%. Kelompok pendorong utama inflasi September adalah kelompok Makanan, Minuman, Tembakau (m-to-m 1,16%, andil 0,49%) dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, BBRT (m-to-m 1,69%, andil 0,21%). Sektor perumahan dan air mengalami lonjakan signifikan akibat penyesuaian tarif air minum PAM oleh Perumdam yang menyumbang andil inflasi m-to-m sebesar +0,21%.

- Komoditas Pendorong Inflasi (m-to-m): Tarif Air Minum PAM (+0,21%), Udang Basah (+0,18%), Daging Ayam Ras (+0,11%), Ikan Layang (+0,07%), Cabai Rawit (+0,07%), Ikan Tongkol (+0,07%), Tomat (+0,07%), Cumi-Cumi (+0,03%), Ayam Hidup (+0,03%), Keramik (+0,02%), Beras (+0,02%), dan Biaya SMP (+0,01%).
- Komoditas Penekan Inflasi (Deflasi m-to-m): Kacang Panjang (-0,04%), Daging Sapi (-0,04%), Bawang Merah (-0,03%), Emas Perhiasan (-0,03%), Ikan Kembung (-0,02%), Minyak Goreng (-0,02%), Cabai Merah (-0,02%), Semen (-0,01%), Bawang Putih (-0,01%), dan Angkutan Udara (-0,01%).
    - **Perbandingan Capaian Regional Se-Provinsi NTB**

Berdasarkan rilis statistik perbandingan inflasi tahunan (y-on-y) Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan September 2026, tingkat inflasi Kabupaten Sumbawa berada pada posisi menengah-tinggi:

1. Kota Bima: 4,76% (IHK 113,40) — Inflasi tertinggi di NTB
2. Kabupaten Sumbawa: 4,57% (IHK 113,23) — Posisi kedua di NTB
3. Kota Mataram: 3,73% (IHK 111,05) — Inflasi terendah di NTB

Posisi ini menegaskan perlunya kewaspadaan penuh TPID Kabupaten Sumbawa terhadap komoditas bergejolak dan kebijakan penyesuaian tarif publik agar laju inflasi daerah tetap terkendali sesuai rentang sasaran nasional.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Memasuki Semester II Tahun 2026, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi oleh TPID Kabupaten Sumbawa, yaitu:

1. Potensi fluktuasi harga komoditas hortikultura.
2. Risiko gangguan distribusi akibat cuaca.
3. Ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.
4. Potensi peningkatan kebutuhan LPG bersubsidi.
5. Keterbatasan intervensi pasar pada wilayah tertentu.
6. Perubahan harga komoditas strategis di tingkat nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan produksi pangan lokal, pengawasan distribusi LPG, serta pelaksanaan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga.

1. Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Strategis

Komoditas pangan strategis masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa. Harga beberapa komoditas mengalami perubahan yang cukup dinamis sebagai

akibat dari perubahan musim tanam dan panen, keterbatasan pasokan, serta meningkatnya permintaan masyarakat.

Komoditas yang memerlukan perhatian antara lain:

- beras;
- cabai rawit;
- cabai merah;
- bawang merah;
- daging ayam ras;
- telur ayam ras.

Fluktuasi harga tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi melalui penguatan produksi lokal, peningkatan cadangan pangan, serta intervensi pasar pada waktu yang tepat.

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Kabupaten Sumbawa masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan beberapa komoditas strategis.

Kondisi tersebut menyebabkan harga di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh:

- perubahan harga di daerah pemasok;
- keterbatasan transportasi;
- cuaca;
- biaya logistik;
- kelancaran distribusi antarpulau.

Ketergantungan ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya gejolak harga ketika terjadi gangguan pada rantai pasok.

1. Distribusi Barang Belum Sepenuhnya Optimal

Kelancaran distribusi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.

Walaupun distribusi barang selama Triwulan II relatif berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala seperti:

- keterlambatan pengiriman akibat kondisi cuaca;
- meningkatnya biaya transportasi;
- waktu tunggu distribusi menuju wilayah tertentu;

belum optimalnya koordinasi distribusi pada saat permintaan meningkat.

Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pasokan komoditas tertentu sehingga memengaruhi harga di pasar.

1. Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi

Salah satu isu strategis pada Triwulan II Tahun 2026 adalah distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

Meningkatnya kebutuhan LPG, baik untuk rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan LPG di beberapa wilayah.

Selain itu, hasil monitoring menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap rantai distribusi mulai dari agen hingga pangkalan guna memastikan penyaluran LPG bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang masih menjadi perhatian antara lain:

- meningkatnya permintaan LPG 3 kg;
- keluhan masyarakat mengenai ketersediaan LPG;
- perlunya peningkatan pengawasan distribusi;
- perlunya pemutakhiran data penerima yang berhak;

perlunya koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Daerah, PT Pertamina Patra Niaga, agen, pangkalan, dan aparat pengawas.

1. Ketersediaan Data dan Informasi

Pengambilan kebijakan pengendalian inflasi memerlukan data yang akurat, cepat, dan terintegrasi.

Meskipun monitoring harga telah dilaksanakan secara rutin, masih diperlukan penguatan sistem informasi harga dan stok pangan agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Pengembangan digitalisasi melalui pemanfaatan sistem informasi daerah diharapkan mampu mendukung penyusunan kebijakan yang lebih berbasis data (evidence-based policy).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Operasionalisasi Penuh Toko Basamula: Mengoptimalkan pasokan komoditas pangan murah secara rutin di Toko Basamula Pasar Seketeng sebagai instrumen rujukan harga pasar.
2. Perluasan Jangkauan GPM: Menjadwalkan operasi pasar murah GPM di wilayah kecamatan dengan indikator kemiskinan dan keterjangkauan pangan yang rentan.
3. Penataan Database LPG 3 Kg: Menuntaskan rekapitulasi data faktual penerima LPG 3 kg berbasis DTKS Desil 1–4 dan NIB Usaha Mikro untuk diterapkan pada sistem pendistribusian tertutup.
4. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Menginisiasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen hortikultura untuk mengamankan pasokan cabai dan bawang saat masa panceklik.
5. Buka Jalur Komunikasi & Mitigasi HBKN: Menyiapkan langkah mitigasi dan stok pangan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Matriks Rencana Tindak Lanjut TPID

No	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pemantauan rutin harga harian dan stok bahan pokok di Pasar Seketeng	Dinas Koperindag / TPID	Rutin Harian

2	Koordinasi ketersediaan dan penyaluran pasokan beras SPHP	Dinas Ketahanan Pangan & BULOG	Rutin Mingguan
3	Pelaksanaan GPM / Operasi Pasar Murah insidentil jika timbul gejolak harga	TPID & OPD Terkait	Insidentil
4	Evaluasi pendataan faktual penerima LPG 3 kg (Desil 1-4 & Usaha Mikro)	Bagian Ekon SDA, Camat, Kades	Oktober 2026
5	Peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok hortikultura lokal	Dinas Pertanian	Berkelanjutan
6	Evaluasi berkala indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah	Bappeda & TPID	Triwulanan
7	Pelaporan berkala kinerja pengendalian inflasi kepada Bupati Sumbawa	Sekretariat Daerah / TPID	Berkala

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Keterjangkauan Harga (Price Affordability)

    Pelaksanaan GPM SPHP dan keberadaan Toko Basamula terbukti efektif menahan lonjakan harga komoditas utama masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Namun demikian, penyesuaian Tarif Air Minum PAM oleh Perumdam pada bulan September memberikan tekanan inflasi signifikan (+0,21% andil m-to-m) yang memerlukan evaluasi formulasi tarif dan mitigasi daya beli bagi kelompok masyarakat rentan.

    2. Ketersediaan Pasokan (Supply Availability)

    Stok beras di gudang BULOG Cabang Sumbawa berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Tantangan utama ketersediaan pasokan terletak pada komoditas hortikultura (cabai rawit, cabai merah, dan tomat) yang sangat tergantung pada pola panen musiman dan pasokan daerah tetangga, serta stabilitas pasokan LPG 3 kg di pangkalan.

    3. Kelancaran Distribusi (Distribution Smoothness)

    Luas wilayah Kabupaten Sumbawa yang mencakup 24 kecamatan memerlukan keandalan rantai pasok dan armada angkutan logistik. Pengawasan ketat pada pangkalan LPG 3 kg dan jalur distribusi angkutan darat/laut menjadi kunci mencegah disparitas harga antar-kecamatan.

    4. Komunikasi Efektif (Effective Communication)

    TPID Sumbawa secara rutin mempublikasikan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan jadwal pasar murah. Koordinasi lintas OPD dan instansi vertikal (BPS, BI, BULOG, Pertamina) berjalan secara harmonis dan responsif dalam menyikapi dinamika harga di lapangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Operasionalisasi Penuh Toko Basamula: Mengoptimalkan pasokan komoditas pangan murah secara rutin di Toko Basamula Pasar Seketeng sebagai instrumen rujukan harga pasar.

2. Perluasan Jangkauan GPM: Menjadwalkan operasi pasar murah GPM di wilayah kecamatan dengan indikator kemiskinan dan keterjangkauan pangan yang rentan.
3. Penataan Database LPG 3 Kg: Menuntaskan rekapitulasi data faktual penerima LPG 3 kg berbasis DTKS Desil 1–4 dan NIB Usaha Mikro untuk diterapkan pada sistem pendistribusian tertutup.
4. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD): Menginisiasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen hortikultura untuk mengamankan pasokan cabai dan bawang saat masa panceklik.
5. Buka Jalur Komunikasi & Mitigasi HBKN: Menyiapkan langkah mitigasi dan stok pangan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

Matriks Rencana Tindak Lanjut TPID

No	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pemantauan rutin harga harian dan stok bahan pokok di Pasar Seketeng	Dinas Koperindag / TPID	Rutin Harian
2	Koordinasi ketersediaan dan penyaluran pasokan beras SPHP	Dinas Ketahanan Pangan & BULOG	Rutin Mingguan
3	Pelaksanaan GPM / Operasi Pasar Murah insidentil jika timbul gejolak harga	TPID & OPD Terkait	Insidentil
4	Evaluasi pendataan faktual penerima LPG 3 kg (Desil 1-4 & Usaha Mikro)	Bagian Ekon SDA, Camat, Kades	Oktober 2026
5	Peningkatan produksi dan efisiensi rantai pasok hortikultura lokal	Dinas Pertanian	Berkelanjutan
6	Evaluasi berkala indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah	Bappeda & TPID	Triwulanan
7	Pelaporan berkala kinerja pengendalian inflasi kepada Bupati Sumbawa	Sekretariat Daerah / TPID	Berkala

1.